ABSTRAK

Rismawan, Novika. 2013. **Kerja Sama Pengelolaan Buah Siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. M Nur Yasin, M.Ag.

Kata Kunci: Cooperative Management of Fruit Siwalan

Tuban memiliki wilayah pertanian yang sangat luas. Oleh karena itu membuat sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hal yang berkaitan dengan pertanian diantaranya adalah *muzâra'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*. Bagi hasil pada akad *muzâra'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah* sesuai kesepakatan bersama dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil panen yang diperoleh dari pengelolaan buah siwalan tersebut. Secara tidak langsung banyak masyarakat yang telah menerapkan akad *muzâra'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah* dalam aktivitas pertanian. Terutama pada masyarakat pedesaan, termasuk juga masyarakat di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Pembagian hasil paroan bidang pertanian pada Desa Manunggal bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani. Untuk itu perlu dilakukan penelitian sehingga dapat menjawab keraguan berkaitan dengan *muzâra'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empirik. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data deskriptif sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai praktek *muzâra'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

Dari hasil penelitian, bahwa faktor utama yang melatarbelakangi praktek bagi hasil di Desa Manunggal adalah masih luasnya lahan pertanian yang kosong yang tidak dikerjakan oleh pemilik lahan. Alasan lainnya adalah bahwa orang yang mempunyai lahan yang kosong tidak mampu untuk menggarap sendiri lahan pertanian yang dimiliki tersebut dikarenakan ada kesibukan tersendiri. Sehingga kebanyakan dari orang-orang yang mempunyai lahan tersebut menyuruh kepada orang lain untuk menggarap lahan pertanian yang kosong tersebut. Pembagian hasil pertanian, para petani bersepakat tentang besarnya pembagian hasilnya yaitu ada 1:3 bagian yang mana 1 bagian untuk pemilik lahan dan 3 bagian untuk petani penggarap. Ada pula petani yang menerapkan pembagian 1/2:1/2 serta adapula yang 2/3 untuk pemilik lahan sedangkan 1/3 untuk petani penggarap begitu juga sebaliknya menurut kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik lahan dan penggarap.